

**PENGARUH INFLASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT),
NILAI TUKAR PETANI (NTP) DAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
TERHADAP KEMISKINAN PADA 15 PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA
TAHUN 2010-2022**

(Skripsi)

Oleh

RETNO AJENG SUGESTI

NPM 2011021052



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**PENGARUH INFLASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) NILAI
TUKAR PETANI (NTP) DAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP
KEMISKINAN PADA 15 PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA
TAHUN 2010-2022**

Oleh

RETNO AJENG SUGESTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH INFLASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT), NILAI TUKAR PETANI (NTP), DAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP KEMISKINAN PADA 15 PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA TAHUN 2010-2022

Oleh

RETNO AJENG SUGESTI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022 secara parsial dan simultan. Kemiskinan berperan sebagai variabel dependen, dengan inflasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani, dan upah minimum provinsi sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan, nilai tukar petani berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan inflasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di 15 provinsi termiskin di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukang Petani, Upah Minimum Provinsi

ABSTRACT

THE EFFECT OF INFLATION, OPEN UNEMPLOYMENT RATE (TPT), FARMER EXCHANGE RATE (NTP), AND PROVINCIAL MINIMUM WAGE (UMP) ON POVERTY IN THE 15 POOREST PROVINCES IN INDONESIA IN 2010-2022

By

RETNO AJENG SUGESTI

This study aims to examine the effect of inflation, open unemployment rate (TPT), farmer exchange rate (NTP), and provincial minimum wage (UMP) on poverty in the 15 poorest provinces in Indonesia in 2010-2022 partially and simultaneously. Poverty acts as the dependent variable, with inflation, open unemployment rate, farmer exchange rate, and provincial minimum wage as the independent variables. This study uses panel data regression and the selected model is the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that inflation had a negative and insignificant effect, the open unemployment rate had a positive and insignificant effect, the farmer exchange rate had a negative and insignificant effect, and the provincial minimum wage had a negative and significant effect. Meanwhile, inflation, open unemployment rate, farmer exchange rate, and provincial minimum wage jointly affect poverty in the 15 poorest provinces in Indonesia.

Keywords: Poverty, Inflation, Open Unemployment Rate, Farmer Value, Provincial Minimum Wage

Judul Skripsi

: **Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan Pada 15 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2022**

Nama Mahasiswa

: **Retno Ajeng Sugesti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2011021052**

Jurusan

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

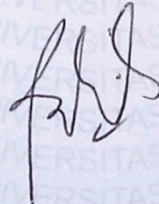


Moneyzar Usman, S.E., M.Si.

NIP 19600621 198603 1 002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.

NIP 19800705 200604 2 002

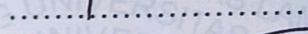
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

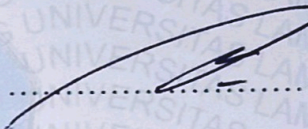
Ketua : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.



Penguji II : Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Ajeng Sugesti

NPM : 2011021052

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan Pada 15 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2022" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung , 17 Oktober 2024



Retno Ajeng Sugesti

RIWAYAT HIDUP



Retno Ajeng Sugesti lahir pada tanggal 04 November 2001 di Kota Metro, Lampung. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Untung Suryanto dan Ibu Hartati.

Penulis memulai pendidikan di TK Aisyiyah Yosomulyo yang terletak di Metro Pusat, Kota Metro pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 7 Metro Pusat pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 2 Metro dan tamat pada tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Metro dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi seperti menjadi staff bidang pengetahuan dan penalaran di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 menjadi staff bidang kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Penulis sempat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Penulis juga melakukan kegiatan magang di SDGs Universitas Lampung pada tahun 2022 dan melakukan kegiatan magang di Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan (Gajahlah Kebersihan) pada bagian *Program Community Organizer Officer* pada tahun 2023.

MOTTO

“Life indeed gets better. As long as you have faith in Allah, you will be better”

(Fura)

“Life is long if you know how to use it...we are not given a short life but we make it short...and wasteful of it”

(Seneca)

“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending”

(C.S Lewis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat yang senantiasa tercurah kepada nabi agung Muhammad SAW, maka kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Untung Suryanto dan Ibu Hartati. Teruntuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku dan pertumbuhanku. Kedua orang tuaku sebagai inspirasi dan motivasi terbesar dalam menyelesaikan tanggung jawab ini. Terima kasih masih tetap sehat serta mampu menemani setiap prosesku dan tetap optimis sesulit apapun keadaanya.

Teruntuk kakakku dan adikku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dan dapat diandalkan.

Tak lupa kepada para dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan yang tak pernah lelah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan kelak, yang senantiasa menasihati dan memberikan arahan agar terus tumbuh lebih baik lagi.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Pada 15 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2022” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan ketulusan dan kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E.,M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Moneyzar Usman, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberikan saran, dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran selama masa pengerjaan skripsi.
5. Ibu Asih Murwiati, S.E.,M.E. dan Ibu Arivina Ratih, S.E.,M.M. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

saran dan nasihat yang membangun kepada penulis dalam masa penyusunan skripsi.

6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan arahan kepada penulis
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Kedua orang tuaku yang terkasih dan teristimewa, Bapak Untung Suryanto, S.H. dan Ibu Hartati, S.Pd.I. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerja keras, dukungan, doa, nasehat, dan motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan untuk kelancaran dan kesuksesan dalam hidupku. Terima kasih telah menguatkan dan mendorongku untuk tidak mudah menyerah dengan caranya sendiri.
10. Kakakku Sukma Ayuningtyas, A.Md.Rad. dan Syaiful Anas, adikku Wahyu Aji Paningal, serta keponakanku yang terlucu Syakeena Shezan Askayra Anas, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan melewati masa-masa menulis skripsi.
11. Hanif Nabil Rabbani selaku teman terdekat yang selalu bersedia untuk memberikan bantuan, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi serta selalu ada dalam suka maupun duka.
12. Teman SMP ku Adinda Safira dan Murni Kartika, terima kasih telah menemaniku bertumbuh sampai sekarang, memberikan motivasi dan dukungan serta senantiasa kebersamaan sejak awal remaja. Semoga kalian terus hidup dengan baik dan sukses dunia akhirat.
13. Teman SMA ku Nurhidayati, terima kasih selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah, menemani dan selalu memberikan motivasi terkhusus pada masa-masa

penulisan skripsi, terima kasih telah menjadi sobat *healing* ku dan tidak pernah lelah untuk menjadi sobatku. Terima kasih juga kepada teman SMA ku yang lain, Marta, Wulan, Nadila, Nadiva, Ridha, Marselina, Adel yang telah memberikan dukungan serta motivasi, yang telah bersedia menjadi temanku dari masa SMA hingga sekarang. Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan dimanapun kalian berada serta sukses dunia dan akhirat.

14. Teman perkuliahan, Sarah, Rara, Rima, Resti, Azizah, Nisa, Anggita, terima kasih telah bersedia untuk menemani selama masa perkuliahan ini dan terima kasih selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk bertahan dalam masa perkuliahan. Terima kasih telah membuat kehidupan perkuliahan ini lebih berwarna dan banyak pengalaman. Semoga pertemanan ini terus terjalin hingga nanti, dan semoga kalian terus hidup dengan baik dan sukses dunia akhirat.
15. Rekan-rekan Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020, terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan ini. Semoga kalian terus hidup dengan baik dan sukses dimanapun kalian berada.
16. Terkhusus untuk diriku sendiri, terimakasih untuk segala perjuangan, kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan. Terima kasih untuk tidak mudah menyerah dan terus mau berjuang di tengah segala kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2024

Penulis

Retno Ajeng Sugesti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah	16
2.1.2 Kemiskinan	18
2.1.3 Inflasi	23
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	27
2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP).....	29
2.1.6 Upah Minimum Provinsi	32
2.2 Hubungan Antar Variabel	34
2.2.1 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan.....	34
2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Kemiskinan	35
2.2.3 Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan Kemiskinan	36
2.2.4 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kemiskinan.....	36
2.3 Tinjauan Empiris	37
2.4 Kerangka Pemikiran	40
2.5 Hipotesis	42
III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	42
3.2 Jenis dan Data Penelitian.....	42
3.3 Definisi Operasional Variabel	43
3.4 Metode Analisis.....	45

3.5 Metode Estimasi	45
3.6 Prosedur Analisis Data	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.1.2 Uji Penentuan Model Regresi Data Panel.....	57
4.1.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	58
4.1.4 Individual Effect	59
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.1.6 Pengujian Hipotesis	70
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan	71
4.2.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan.....	73
4.2.3 Pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap Kemiskinan.....	75
4.2.4 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan	76
V. SIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin (P0) pada 15 Provinsi Periode September 2022 ..	4
2. Inflasi 15 Provinsi Tahun 2019-2022 Triwulan IV	6
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 15 Provinsi Tahun 2019-2022	8
4. Nilai Tukar Petani (NTP) 15 Provinsi Tahun 2019-2022	10
5. Upah Minimum Provinsi (UMP) 15 Provinsi Tahun 2019-2022	12
6. Jenis dan Data Penelitian	42
7. Uji Statistik Durbin-Watson.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2012-Maret 2023.....	2

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

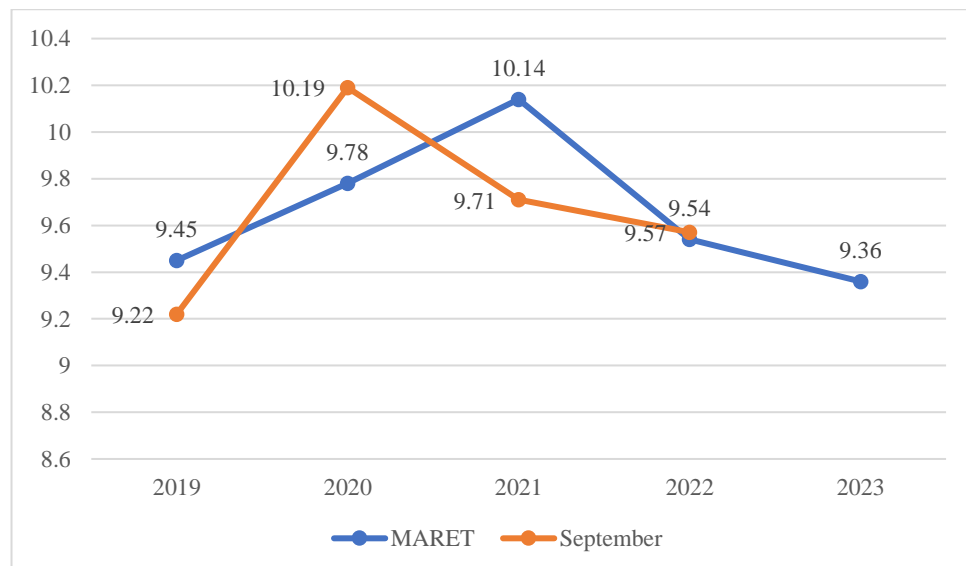
Kemiskinan ialah salah satu masalah makro ekonomi utama suatu negara. Kemiskinan secara umum dapat diinterpretasikan sebagai situasi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Intan, 2023). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah situasi sosial ekonomi individu atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat ditilik dari tingkat kelangkaan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperkuat kesejahteraan.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan ekonomi yang dijumpai negara-negara di dunia, seperti Indonesia. Masalah kemiskinan yang terjadi pada suatu negara dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap kehidupan masyarakat secara komprehensif (Ratih, 2023). Kemiskinan ialah masalah multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sistem sosial lainnya (Adawiyah, 2020). Beberapa aspek pemicu masalah kemiskinan antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, rendahnya tingkat pendidikan, laju perkembangan penduduk yang tinggi, distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, kualitas kesehatan buruk, sumber daya alam yang tidak ada, kebiasaan dan sikap orang-orang, dan struktur sosial yang tidak sanggup mengasosiasikan masyarakat dengan sumber daya.

Kemiskinan dapat menjadi penyebab utama adanya hambatan-hambatan sosial yang ada di masyarakat. Tingginya jumlah penduduk miskin di negara berkembang

memunculkan berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial maupun ekonomi (Pratama, 2023). Penanggulangan kemiskinan di negara berkembang dilakukan melalui program-program yang harus selalu intensif dilakukan. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif membutuhkan keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan golongan yang memiliki tanggungjawab mengenai penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Todaro mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasarnya. Untuk menentukan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 kebutuhan dasar harus terpenuhi pada saat pengeluaran bulanan per kapita berada di bawah Garis Kemiskinan sebesar Rp. 550.458 per kapita per bulan. Jika dibandingkan pada September 2022, Garis Kemiskinan tersebut naik sebesar 2,78 persen, sedangkan bila dibandingkan pada bulan Maret 2022, mengalami kenaikan sebesar 8,90 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2012-Maret 2023.

Sementara itu, menurut BPS pada September 2022, penduduk miskin di Indonesia sejumlah 26,36 juta jiwa atau sama dengan 9,57%. Bandingkan pada Maret 2022,

jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sejumlah 200.000 jiwa. Namun, kuantitas penduduk miskin ini lebih kecil jika dibandingkan pada September 2021. Walaupun kemiskinan di Indonesia sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu yang lalu, keadaan perekonomian Indonesia mengalami degradasi akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan status perekonomian Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah sejak Juli 2021. Efek dari adanya pandemi menyebabkan terhambatnya kemajuan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Pada September 2019, Indonesia sudah berhasil menurunkan kemiskinan terendah mencapai 9,2 persen, namun pada Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen. Bahkan pada September 2020 dan Maret 2021, persentase kemiskinan di Indonesia secara nasional mencapai 10 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, tetapi menurut Bank Dunia (World Bank), tingkat kemiskinan di Indonesia justru meningkat. Hal ini disebabkan karena Bank Dunia meningkatkan batas garis kemiskinan jauh di atas garis kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Dasar perhitungan terbaru yang digunakan oleh Bank Dunia mengacu pada skala paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) 2017. Oleh karena itu, sebanyak 13 juta masyarakat Indonesia berubah status menjadi golongan masyarakat miskin, dan menurut *World Population Review* (WPR), Indonesia berada pada urutan ke 73 sebagai negara termiskin di dunia (Triono, 2023).

Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN, Indonesia berada di urutan keenam dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Kamboja. Jika dibandingkan dengan Malaysia, tingkat kemiskinan Indonesia lebih tinggi 3,3 persen dari kemiskinan di Malaysia (Aditiya, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengatur perekonomian melalui tiga peran. 1) Peran alokasi, dengan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kemiskinan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan program bantuan sosial. 2) Peran distribusi, yaitu pemerintah memastikan distribusi sumber daya ekonomi yang adil dengan mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. 3) Peran stabilisasi, pemerintah

bisa mengaplikasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk memelihara stabilitas ekonomi yang akan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan akan makanan, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan kemiskinan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia. Menganalisis kemiskinan harus memasukkan unsur spasial karena kemiskinan memiliki sifat ketergantungan, artinya kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kemiskinan yang terjadi di daerah lain (Z. dan I. B. Emalia, 2022). Diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin (P0), didapatkan 15 provinsi yang menjadi provinsi yang paling miskin di Indonesia dengan kriteria rata nilai persentase kemiskinan di daerah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional pada periode September 2022, yaitu sebesar 9,57 persen. Provinsi-provinsi tersebut, yaitu provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah. Adapun penelitian yang dilakukan pada tahun 2010-2022 karena pada rentang waktu tersebut perekonomian di Indonesia mengalami fluktuasi akibat berbagai kejadian konflik geopolitik dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin (P0) pada 15 Provinsi Periode September 2022

Nama Provinsi	P0 (persen)
Papua	26,80
Papua Barat	21,43
Nusa Tenggara Timur	20,23
Maluku	16,23
Gorontalo	15,51
Aceh	14,75
Bengkulu	14,34
Nusa Tenggara Barat	13,82
Sulawesi Tengah	12,30
Sumatera Selatan	11,95
Sulawesi Barat	11,92
D.I. Yogyakarta	11,49
Lampung	11,44
Sulawesi Tenggara	11,27
Jawa Tengah	10,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari tabel persentase kemiskinan di atas dapat diamati bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi ialah provinsi Papua dengan persentase kemiskinan sebesar 26,80 persen. Lalu diikuti provinsi Papua Barat dengan persentase kemiskinan sebesar 21,43 persen, dan pada urutan ketiga berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan sebesar 20,23 persen. Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi dengan rata-rata nilai kemiskinan tinggi yang besaran persentase kemiskinannya berada jauh di atas angka persentase kemiskinan nasional pada periode yang sama. Begitu juga persentase kemiskinan pada 12 provinsi lainnya yang memiliki nilai persentase kemiskinan lebih besar dari persentase kemiskinan nasional pada periode yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan mengaplikasikan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam perhitungan yang dilakukan oleh BPS, sebesar 75 persen penduduk miskin menghabiskan pengeluarannya untuk makanan. Sedangkan kelompok pangan masih memiliki peran besar akan tingkat inflasi. Inflasi tahunan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga pada seluruh indeks kelompok pengeluaran, yang tertinggi ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jika pemerintah tidak mengendalikan inflasi, kerentanan sosial dan jumlah penduduk miskin akan meningkat akibat menurunnya daya beli masyarakat (Murwiati, 2023). Kondisi ini akan memperparah keadaan masyarakat yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kategori miskin, dan kenaikan harga akan memperparah kondisi tersebut.

Tabel 2. Inflasi 15 Provinsi Tahun 2019-2022 Triwulan IV

Nama Provinsi	Inflasi (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Papua	1,90	1,64	1,79	5,68
Papua Barat	1,93	0,71	3,47	3,87
Nusa Tenggara Timur	0,67	0,61	1,67	6,65
Maluku	2,87	0,21	4,01	6,28
Gorontalo	2,87	0,81	2,59	5,15
Aceh	1,69	3,59	2,24	5,89
Bengkulu	2,59	0,89	2,42	5,92
Nusa Tenggara Barat	1,87	0,60	2,21	6,23
Sulawesi Tengah	2,30	1,62	2,20	5,96
Sumatera Selatan	2,06	1,55	1,82	5,94
Sulawesi Barat	1,43	1,78	4,39	4,85
D.I. Yogyakarta	2,77	1,40	2,29	6,49
Lampung	3,44	2,00	2,19	5,51
Sulawesi Tenggara	2,77	1,33	2,58	7,39
Jawa Tengah	2,80	1,55	1,70	5,63

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Dari tabel inflasi tahun 2019-2022 di atas, terlihat bahwa nilai inflasi cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2021 terlihat angka inflasi cenderung rendah dan sangat aman bagi perekonomian, namun sebagian besar provinsi tersebut mengalami peningkatan inflasi yang signifikan ditahun 2022, bahkan provinsi Sulawesi Tenggara mencapai angka inflasi sebesar 7 persen. BPS mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penyebab dari terjadinya lonjakan inflasi pada tahun 2022. Pertama, lonjakan tingkat inflasi disebabkan oleh kondisi pasca pemulihan covid 19 yang berakibat terhambatnya pasokan yang memicu kenaikan harga. Selanjutnya disebabkan karena perselisihan geopolitik yang terjadi di dunia yang berefek pada terganggunya pasokan energi sehingga Indonesia harus melakukan aklimatisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terjadinya inflasi tinggi di berbagai negara sehingga berdampak terhadap tingkat suku bunga. Pada tahun 2022, Indonesia sempat mengalami krisis minyak goreng sepanjang tahun yang tentunya hal ini berakibat pada naiknya tingkat inflasi. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi secara global menyebabkan kenaikan harga terutama

makanan, energi, dan lainnya yang menyebabkan tingkat inflasi di provinsi-provinsi tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2022.

Akibat dari peningkatan inflasi pada tahun 2022, berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dibuktikan pada September 2022, persentase kemiskinan meningkat 0,3 persen, dan jumlah penduduk miskin bertambah 200.000 jiwa secara nasional. Hal ini sesuai dengan penelitian (Ningsih, 2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dan pada penelitian (Murjani, 2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2020) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Selain karena tingkat inflasi, masalah pengangguran juga berdampak akan tingkat kemiskinan. Pengangguran menjadi salah satu parameter untuk mengukur pembangunan ekonomi. Dari tingkat pengangguran, maka terlihat keadaan perekonomian suatu daerah, termasuk berkembang, lambat, atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat menjadi penyebab utama adanya masalah kemiskinan. Kemiskinan dan standar hidup yang rendah berkorelasi kuat dengan pengangguran. Kondisi-kondisi ini dapat dinyatakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam wujud tingkat pendapatan yang di bawah rata-rata, perumahan di bawah standar, kesehatan yang buruk, sedikit atau tidak adanya akses terhadap pendidikan, angka kelahiran yang tinggi, angka kematian yang tinggi, dan kesempatan kerja yang sangat terbatas (Y. A. Sari, 2021).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 15 Provinsi Tahun 2019-2022

Nama Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Papua	3,65	4,28	3,33	2,83
Papua Barat	6,43	6,80	5,84	5,37
Nusa Tenggara Timur	3,14	4,28	3,77	3,54
Maluku	6,69	7,57	6,93	6,88
Gorontalo	3,76	4,28	3,01	2,58
Aceh	6,17	6,59	6,30	5,89
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	3,59
Nusa Tenggara Barat	3,28	4,22	3,01	2,89
Sulawesi Tengah	3,11	3,77	3,75	3,00
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63
Sulawesi Barat	2,98	3,32	3,13	2,34
D.I. Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	4,06
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52
Sulawesi Tenggara	3,52	4,58	3,92	3,36
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel di atas tampak bahwa tingkat pengangguran cenderung menurun, khususnya pada tahun 2021 dan 2022. Namun ada beberapa daerah yang persentase tingkat penganggurannya lebih besar daripada persentase tingkat pengangguran nasional sebesar 5,86 persen, yaitu provinsi Maluku dan Aceh. Di provinsi Maluku dari tahun 2019-2022, persentase tingkat pengangguran selalu berada di atas angka enam persen. Bahkan pada tahun 2020, tingkat penganggurannya sebesar 7,57 persen, perkara ini dipicu oleh melimpahnya perusahaan yang melangsungkan PHK karena pandemi covid 19. Namun, persentase tingkat pengangguran ini terlihat mulai melandai pada tahun 2021 sampai 2022. Begitu juga yang terjadi di provinsi Aceh, terlihat dari tahun 2019-2021, persentase tingkat pengangguran selalu berada di atas enam persen. Namun, pada tahun 2022, persentase tingkat pengangguran mulai menurun ke angka lima persen. Tingginya tingkat pengangguran di Aceh ini juga disebabkan oleh ketidakcocokan antara tenaga kerja dan perusahaan.

Beberapa penelitian mendukung hipotesis tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak atas tingkat kemiskinan. Penelitian (Putri, 2021) yang hasilnya memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian (Faisal, 2020) menunjukkan kesimpulan

pengujian bahwa pada jangka pendek dan jangka panjang tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menuturkan bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan terlalu bergantungnya masyarakat pedesaan terhadap pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Rendahnya produktivitas dalam industri ini merupakan salah satu dari banyak variabel yang berkontribusi terhadap kemiskinan di sektor pertanian dan sering kali dipengaruhi oleh kultur dan struktur. Hal ini disebabkan oleh alokasi lahan pertanian yang tidak merata, rendahnya kemampuan masyarakat di bidang teknologi, tingkat pendidikan yang rendah, nilai tukar petani yang lemah, dan sulitnya akses terhadap modal (Nasrun, 2020).

Indonesia adalah negara agraris, sektor pertanian adalah penggerak utama ekonomi dan pembangunan. Kondisi geografis Indonesia mendukung hal ini. Karena mayoritas penduduk di negara-negara miskin bergantung pada sektor pertanian, sektor ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi (Z. Emalia, 2018). Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi di Indonesia Bagian Barat sebagian besar disebabkan oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani dengan nilai pendidikan yang rendah, dan kurangnya sokongan dari lembaga atau pemerintah terkait. Kondisi ini akan menyebabkan kehidupan masyarakat miskin pada bagian ini akan konstan terbelakang, rendahnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses, sumber daya manusia yang kurang terserap, serta kurangnya ilmu usaha yang dimiliki menyebabkan efisiensi dan keterampilan kerja rendah (Maulidina, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan NTP secara umum ialah rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Perhitungan NTP didasarkan pada anggapan bahwa petani menghasilkan produk pertanian yang kemudian dijual. Sebaliknya, petani juga membayar kebutuhan barang dan jasa untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan mengeluarkan biaya produksi. (BPS, 2022)

Tabel 4. Nilai Tukar Petani (NTP) 15 Provinsi Tahun 2019-2022

Nama Provinsi	Nilai Tukar Petani (NTP) (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Papua	92,64	102,78	100,66	99,29
Papua Barat	102,22	101,08	101,32	112,06
Nusa Tenggara Timur	106,26	96,24	96,14	95,61
Maluku	100,12	97,68	104,16	103,88
Gorontalo	104,83	101,13	105,59	99,19
Aceh	93,35	98,01	104,33	110,18
Bengkulu	112,94	122,12	143,93	139,85
Nusa Tenggara Barat	115,27	109,22	106,88	107,98
Sulawesi Tengah	96,73	95,91	103,51	101,17
Sumatera Selatan	90,30	101,83	113,15	100,33
Sulawesi Barat	114,04	115,30	129,66	118,55
D.I. Yogyakarta	103,41	99,71	98,07	100,00
Lampung	101,97	96,75	106,29	102,19
Sulawesi Tenggara	92,58	97,28	101,08	99,52
Jawa Tengah	106,00	101,49	103,18	107,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sesuai dengan arti angka NTP yang dijelaskan oleh BPS, jika $NTP > 100$ menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Artinya, NTP mengalami kenaikan jika dibandingkan NTP tahun dasar. Jika $NTP = 100$ menunjukkan indeks harga yang diterima petani sama besar dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya, NTP tidak mendapati kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan NTP tahun dasar. Jika $NTP < 100$ memperhatikan indeks harga yang diterima petani lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar petani. Artinya, NTP mengalami penurunan jika dibandingkan NTP tahun dasar. (BPS, 2022).

Dari tabel di atas terlihat bahwa NTP dari tahun 2019-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata NTP tertinggi berada pada provinsi Bengkulu, bahkan pada tahun 2021 besaran NTP lebih dari 140 persen. Angka NTP ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan besaran NTP nasional pada periode yang sama. Namun, jika dibandingkan pada tahun 2021, NTP pada tahun 2022 mengalami degradasi sebesar 4,08 persen. Kondisi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2022, NTP selalu berada di bawah 100 persen. Hal ini bisa terjadi karena tingginya biaya hidup

dan biaya produksi yang harus dibayar petani dibandingkan dengan rendahnya harga yang didapatkan dari hasil produksi yang dijual. Dan beberapa provinsi yang tingkat NTP nya juga perlu diwaspadai, seperti provinsi Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara. Rendahnya NTP perlu diawasi karena jika NTP selalu di bawah 100 persen akan berakibat pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya akan meningkatkan jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Hipotesis NTP berpengaruh terhadap kemiskinan didukung oleh penelitian (Yesi, 2021) yang hasil dari pengujiannya menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan di Sumatera Selatan. Selain itu, pada penelitian (Maulidina, 2022) yang hasilnya menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Salah satu faktor yang juga memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), karena salah satu aspek yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah penghasilan. Menurut (Nurkse, 1961) dalam (Hanifah, 2021) dalam teori "*The Vicious Cycle of Poverty*", teori ini berpendapat bahwa pendapatan per kapita mewakili titik terendah kemiskinan. Premis teori ini adalah, bahwa masyarakat dari kelompok berpendapatan rendah tidak mampu menabung atau berinvestasi sehingga tidak dapat memutus siklus kemiskinan, sedangkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi mampu untuk menabung dan berinvestasi sehingga dapat mempertahankan status mereka. Hal ini dimulai dengan rendahnya gizi, yang kemudian menyebabkan rendahnya kesehatan, yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya produktivitas, dan berujung pada rendahnya pendapatan pada tingkat yang lebih tinggi lagi.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi (UMP) 15 Provinsi Tahun 2019-2022

Nama Provinsi	Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Papua	3.240.900,00	3.516.700,00	3.516.700,00	3.561.932,00
Papua Barat	2.934.500,00	3.134.600,00	3.134.600,00	3.200.000,00
Nusa Tenggara Timur	1.795.000,00	1.950.000,00	1.945.902,00	1.975.000,00
Maluku	2.400.664,00	2.604.961,00	2.604.960,00	2.619.312,83
Gorontalo	2.384.020,00	2.788.826,00	2.586.900,00	2.800.580,00
Aceh	2.916.810,00	3.165.031,00	3.165.030,00	3.166.460,00
Bengkulu	2.040.407,00	2.213.604,00	2.213.604,00	2.238.094,31
Nusa Tenggara Barat	2.012.610,00	2.183.883,00	2.183.883,00	2.207.212,00
Sulawesi Tengah	2.123.040,00	2.303.711,00	2.303.710,00	2.390.739,00
Sumatera Selatan	2.804.453,00	3.043.111,00	3.043.111,00	3.144.446,00
Sulawesi Barat	2.381.000,00	2.678.863,00	2.571.328,00	2.678.863,00
D.I. Yogyakarta	1.570.923,00	1.704.608,00	1.765.000,00	1.840.915,53
Lampung	2.241.270,00	2.432.002,00	2.431.324,00	2.440.486,18
Sulawesi Tenggara	2.351.870,00	2.552.015,00	2.552.014,00	2.576.016,96
Jawa Tengah	1.605.396,00	1.742.015,00	1.798.979,00	1.812.935,43

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemnaker, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa UMP pada 15 provinsi tersebut cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. UMP tertinggi berada di provinsi Papua dengan rata-rata UMP sebesar Rp 3.400.000 dan UMP terendah berada di provinsi D.I. Yogyakarta dengan rata-rata UMP sejumlah Rp 1.700.000 . Namun, dari data di atas terlihat sebagian besar provinsi tidak mengalami kenaikan UMP pada tahun 2021, bahkan ada provinsi yang malah menurunkan UMP. Hal itu disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan yang menurun akibat pandemi covid 19. Kenaikan upah minimum memiliki tujuan agar pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kemiskinan secara keseluruhan (Islami, 2019). Hipotesis terkait pengaruh UMP terhadap kemiskinan didukung oleh penelitian (Priseptian, 2022) yang hasil dari pengujiannya menunjukkan bahwa UMP mempunyai efek negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian (Putri, 2021) menunjukkan hasil dari pengujian bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Dari uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang dan beberapa jurnal sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian skripsi tentang pengaruh inflasi,

tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani dan upah minimum provinsi pada masalah kemiskinan yang terjadi di 15 provinsi termiskin di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian masalah pada latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022?
3. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah, maka didapatkan tujuan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diinginkan mampu membagikan kemaslahatan bagi peneliti dan pihak lain sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih luas terkait masalah kemiskinan yang terdapat di Indonesia dan berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut.

2. Bagi Pihak Lain

Adanya penelitian ini diinginkan membagikan kemaslahatan bagi pemerintah karena penelitian ini bisa memberikan bantuan masukan untuk kebijakan yang akan dibuat terkait pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia dan diharapkan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah

Individu dan masyarakat tidak hanya mengandalkan peran sektor swasta untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Di samping pelaku ekonomi lainnya, peran pemerintah dan mekanisme pasar yang merupakan interaksi antara penawaran dan permintaan yang saling melengkapi.

Menurut Groves (1953) dalam (Ridwan, 2021) bahwa kaum klasik, khususnya Adam Smith, mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi pemerintah dalam bidang pertahanan nasional
2. Fungsi pemerintah dalam bidang keadilan sosial
3. Fungsi pemerintah dalam bidang pekerjaan umum

Urusan seperti ini tidak pernah menarik ketertarikan masyarakat maupun pihak swasta, baik secara kolektif maupun privat untuk mengupayakannya. Hal ini terjadi karena tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut, bahkan terkadang biaya untuk hal tersebut lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Tugas pemerintah adalah mengendalikan, meningkatkan dan mengawasi operasi sektor swasta. Pemerintah memiliki tiga peran dalam mengatur perekonomian, yaitu :

1. Peran Alokasi

Kegagalan pasar dalam mengakomodir produksi beragam jenis barang pada taraf utilitas masyarakat yang diukur berdasarkan perolehan pendapatan riil perkapita maksimum menimbulkan pemerintah melakukan aktivitas alokasi. Melalui peran ini, pemerintah dapat mengatasi kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor berdampak langsung pada

pengentasan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan dan program bantuan sosial.

2. Peran Distribusi

Distribusi upah dan peran distribusi mempunyai keterkaitan yang erat. Karena adanya *trade off* maka dilakukannya distribusi antara pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Tugas pemerintah adalah menciptakan mekanisme *trickle-down* yang memungkinkan setiap orang merasakan pendapatan yang diperoleh negara dan mengatur dengan cara mendorong kesetaraan lebih baik daripada pendapatan saat ini. Melalui peran ini, untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah dapat memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Peran Stabilisasi

Fungsi utama pemerintah adalah menjaga stabilitas perekonomian. Perekonomian yang seluruhnya dijalankan oleh sektor swasta akan sangat rentan terhadap guncangan yang mengakibatkan inflasi dan pengangguran. Berkurangnya daya beli suatu barang menyebabkan penurunan produksinya. Pengangguran akan terjadi jika hal ini tidak diatasi, maka stabilitas perekonomian dan politik akan terpengaruh. Melalui peran ini, untuk mengatasi kemiskinan, negara dapat mengaplikasikan kebijakan fiskal dan moneter demi mengawasi stabilitas ekonomi yang nantinya akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Selama periode resesi, intervensi pemerintah seperti stimulus ekonomi dapat menjaga daya beli masyarakat.

Musgrave dan Musgrave (1991) menyatakan bahwa Alokasi, distribusi, dan stabilitas merupakan tiga tanggung jawab utama pemerintah nasional dan/atau daerah. Fungsi alokasi menggambarkan bagaimana pemerintah turun tangan ketika mekanisme pasar gagal mengalokasikan barang publik atau menyediakan semua sumber daya untuk penggunaan yang bijaksana baik sebagai barang publik maupun barang swasta. Belanja publik untuk proyek infrastruktur juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perekonomian. Jenis dan jumlah belanja publik yang dialokasikan untuk inisiatif pembangunan ekonomi dan sosial dalam perekonomian akan menentukan bagaimana belanja pemerintah untuk infrastruktur

publik diperkirakan akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tanggung jawab pemerintah untuk menjaga distribusi aset dan kesejahteraan yang adil dan merata dikenal sebagai fungsi distribusi. Terakhir, penggunaan anggaran pemerintah sebagai senjata untuk meningkatkan lapangan kerja, stabilitas, dan laju pertumbuhan ekonomi terkait dengan peran stabilisasi (Ambya, 2022).

2.1.2 Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah akibat dari tidak mencukupinya pendapatan atau tidak cukupnya pengeluaran yang menghalangi seseorang untuk mempertahankan standar hidup yang cukup tinggi agar dia dan keluarganya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat dalam hal fisik, ekonomi, dan tingkat mental (Senewe, Julita et al., 2021).

Kapabilitas memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) merupakan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan. Gagasan ini didasarkan pada *Handbook on Poverty and Inequality* oleh *World Bank*. Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan seperti ketidakmampuan untuk membayar keperluan seperti makanan dan non-makanan. Sekiranya rata-rata pengeluaran per kapita bulanan penduduk kurang dari garis kemiskinan, maka mereka tergolong miskin (Haughton, 2009).

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam (Annur, 2013) terdapat lima kelas dalam uraian kemiskinan, yaitu :

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diukur melalui pemenuhan kebutuhan pokok paling rendah agar individu mampu hidup memadai. Selain itu, kemiskinan absolut juga ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk membayar kebutuhannya.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif timbul karena belum berhasilnya sebuah kebijakan pembangunan mencapai segenap golongan masyarakat karenanya terjadi ketimpangan peredaran pendapatan.

c) Kemiskinan Struktural

Ketika seseorang dianggap miskin secara struktural, itu berarti budaya atau pola pikirnya menghalangi mereka untuk mencoba meningkatkan taraf hidupnya, bahkan ketika ada bantuan dari luar.

d) Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor sosiokultural yang memengaruhi sikap tidak produktif dan pilihan gaya hidup, kurangnya sumber daya dan isolasi (daerah yang minim sumber daya alam dan daerah terpencil), rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, kurangnya kesempatan kerja dan ketidakmampuan masyarakat untuk mengadopsi ekonomi pasar.

e) Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk perubahan perekonomian dari kondisi normal ke kondisi kritis, variasi musim, bencana alam, atau peristiwa lain yang berdampak buruk pada standar hidup masyarakat.

b. Teori Kemiskinan

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty* menjelaskan kemiskinan merupakan sebuah siklus yang sulit diputus (Hanifah, 2021). Pada teori ini menjelaskan bahwa kelompok miskin cenderung memiliki penghasilan yang rendah dan mengakibatkan kurang terpenuhinya keperluan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Akibat dari rendahnya pendapatan maka tabungan individu juga rendah. Lalu, rendahnya tabungan individu akan berdampak pada rendahnya investasi yang mengakibatkan terjadinya kekurangan modal untuk menambah produktivitas, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Siklus ini akan terus berulang dimana

ketidaksempurnaan pasar dan keterbelakangan akan semakin memperparah kemiskinan (Jhingan, 2010).

2. Teori Pradigma Sosial Demokrasi

Paradigma sosial demokrasi, juga dikenal sebagai paradigma demokrasi-sosial, memberikan pandangan yang berbeda dalam memahami kemiskinan. Paradigma sosial demokrasi menekankan pada tiga dimensi, yaitu individu, struktur ekonomi, dan politik. Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidakseimbangan sistem ekonomi dan politik, serta ketidakadilan sosial (Sukidjo, 2009).

Paradigma ini menegaskan pada kesetaraan sebagai prasyarat esensial dalam mencapai kemandirian dan kebebasan. Kesetaraan di sini tidak hanya dalam arti kesetaraan formal, tetapi juga kesetaraan substansial, yaitu kesetaraan dalam kepemilikan sumber daya. Paradigma sosial demokrasi melibatkan peran negara yang aktif dalam menangani kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan pada paradigma ini meliputi penyaluran pendapatan secara selektif, pelatihan keterampilan, dan intervensi negara dalam pola pendistribusian pendapatan melalui kebijakan sosial.

c. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai berbagai penyebab dan tidak ada solusi tunggal yang dapat menjelaskan seluruhnya. Hal ini terlihat dari beragamnya sudut pandang mengenai penyebab timbulnya kemiskinan berdasarkan waktu, tempat dan keadaan.

Pemicu kemiskinan berdasarkan Kartasasmita (1993:2-3) dalam (Solihin, 2014) dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang berlangsung secara alamiah atau kemiskinan yang dialami karena berasal dari kelompok masyarakat yang tumbuh di bawah garis kemiskinan. Golongan masyarakat ini menjadi melarat karena kekurangan sumber daya yang cukup, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya dari kekuatan pembangunan lainnya.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan (absolut atau relatif) yang diakibatkan oleh kesenjangan sistem masyarakat yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan karena hasil pembangunan yang tidak merata juga disebut kemiskinan struktural.

3. Kemiskinan Kultural

Istilah kemiskinan kultural menggambarkan pola pikir seseorang atau masyarakat sebagai akibat dari cara hidupnya, kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkannya dan rasa kekurangannya.

e. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana masyarakat mampu menunaikan kebutuhan hidup dan masyarakat yang layak sehingga mampu tumbuh dan menjalankan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945, negara mempunyai kewajiban untuk berupaya menjunjung, membela, dan mewujudkan hak-hak masyarakat atas kebutuhan pokok. Negara harus melaksanakan inisiatif-inisiatif ini karena memaksimalkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah salah satu sasaran primer pembangunan nasional. Ketentuan perundang-undangan sebagian memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya yang ada saat ini untuk mengoptimalkan kemakmuran masyarakat miskin. Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang secara tegas mengatur masyarakat miskin. Masyarakat miskin kemudian diurus berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Masyarakat Kurang Mampu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tanggung jawab yang telah ditentukan kepada daerah dan melimpahkan sebagian fungsi pemerintahan kepada daerah melalui perluasan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan. Dalam rangka menerapkan desentralisasi, hal ini juga

berarti memberikan kendali kepada masyarakat, terutama kelompok miskin, terhadap proses pembangunan sehingga mereka dapat membantu diri mereka sendiri.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah kemiskinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 31 terkait pengendalian masyarakat miskin, sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan meningkatkan kesadaran mengenai kebijakan, metode, dan program yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan, dengan memberikan penekanan khusus pada kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Memanfaatkan pemberdayaan pemangku kepentingan untuk mengatasi kemiskinan di tingkat kabupaten atau kota
- 3) Mengontrol dan mengelola kebijakan, inisiatif, dan rancangan kabupaten/kota yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.
- 4) Melakukan penilaian kebijakan, strategi dan rancangan pada tingkat kabupaten/kota
- 5) Menangani masyarakat miskin dengan disediakannya sarana dan prasarana
- 6) Menyediakan pendanaan yang cukup dan tepat untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dialokasikan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu

Sementara itu, model pembangunan yang mendukung berbagai inisiatif pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat digunakan untuk mengidentifikasi fokus strategi pelaksanaan setiap program. Ada empat kategori utama model pembangunan yang dipilih negara-negara berkembang. Pertumbuhan pendapatan nasional menjadi tujuan utama Model Pembangunan I. Paradigma pembangunan II berpusat pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan mendasar. Dengan melibatkan masyarakat dan kelompok sasaran dalam identifikasi kebutuhan dan proses pembangunan, Model Pembangunan III bermaksud untuk mengoptimalkan mutu sumber daya manusia. Sementara itu model pembangunan IV berkonsentrasi pada peningkatan daya saing untuk menjawab tantangan era globalisasi dan otonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program guna mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Program tersebut dibagi dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bantuan sosial. Pada bidang pendidikan, pemerintah melaksanakan program bantuan berupa adanya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Serta pada jenjang perguruan tinggi juga terdapat beasiswa yang diberikan pemerintah terhadap calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, yaitu bidikmisi. Pada bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan berupa disediakannya BPJS dan KIS, serta pelayanan kesehatan gratis pada kelas III bagi keluarga miskin di rumah sakit. Lalu, pada bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah terhadap masyarakat miskin berupa bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), Program Keluarga Harapan (PKH), RASKIN, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) (wulandari, 2022).

2.1.3 Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Peningkatan harga secara umum selama jangka waktu yang telah ditetapkan merupakan definisi umum dari inflasi. Oleh karena itu, untuk memahami inflasi perlu diketahui beberapa hal: (1) Sistem peningkatan harga-harga umum barang, jasa, dan komoditas lain yang berulang-kali disebut inflasi. (2) Harga barang-barang ini tidak harus meningkat dalam persentase yang sama, yang terpenting adalah harga produk secara umum terus meningkat selama jangka waktu yang telah ditentukan (satu bulan atau satu tahun). (3) Inflasi tidak terjadi apabila kenaikan harga hanya terjadi satu kali dan bersifat sementara, meskipun sering terjadi dan tidak mempunyai akibat yang bertahan lama (APBN).

Menghitung kenaikan harga rata-rata sejumlah besar barang dan jasa selama rentang waktu tertentu merupakan salah satu metode untuk mengukur inflasi. Tidak setiap kenaikan harga mengakibatkan inflasi. Banyak faktor yang mempengaruhi harga berbagai barang dan jasa. Kenaikan harga suatu barang mungkin terkait atau tidak dengan peningkatan inflasi. Apabila inflasi terus berlangsung pada jangka yang lama, maka periode ini disebut sebagai inflasi berlanjut (Case, 2007). Tanda peringatan awal memburuknya perekonomian suatu negara adalah tingginya tingkat

inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat memotivasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga. Sektor riil mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif ketika pemerintah pusat menaikkan suku bunga. Jika lebih banyak lagi, angka pengangguran akan semakin tinggi. Kenaikan inflasi dalam jangka pendek mengindikasikan ekspansi ekonomi, namun peningkatan dalam jangka panjang. Inflasi yang berlebihan mungkin tidak baik. Harga barang dalam negeri umumnya lebih tinggi dibandingkan harga barang impor karena tingginya tingkat inflasi. Oleh karena itu, pembelian barang impor dibandingkan barang dalam negeri akan meningkat.

b. Teori-Teori Inflasi

1. Teori Keynes

Teori inflasi menurut Keynes menjelaskan bahwa inflasi muncul lantaran suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dasar pemikiran model inflasi yang dicetuskan Keynes adalah inflasi berkembang karena masyarakat berkeinginan hidup melebihi kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat akan barang-barang (permintaan agregat) melampaui jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan munculnya *inflationary gap* (Simanungkalit, 2020). Lantas Keynes beranggapan bahwa meningkatnya harga tidak hanya disebabkan oleh kenaikan banyaknya uang yang beredar, melainkan juga dikarenakan oleh kenaikan produksi. Teori Keynes digunakan untuk mejabarkan inflasi dalam jangka pendek.

c. Indikator Pengukuran Inflasi

Inflasi yang terjadi di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Untuk mendapatkan informasi harga berbagai barang dan jasa yang dianggap mewakili pengeluaran masyarakat, BPS melakukan survei terhadap responden. Tingkat inflasi kemudian ditentukan menggunakan data dengan membandingkan harga saat ini dengan harga pada periode waktu sebelumnya dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain :

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Berdasarkan *Classification of Individual*

Consumption by Purpose (COICP) 2018, IHK terbagi dalam 11 (sebelas) kategori pengeluaran, antara lain :

- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
- Kelompok pakaian dan sepatu;
- Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
- Kelompok peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan rutin;
- Kelompok kesehatan;
- Kelompok untuk transportasi;
- Kelompok jasa keuangan, informasi, dan komunikasi;
- Kelompok olah raga, rekreasi, dan kebudayaan;
- Kelompok pendidikan;
- Kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran; dan
- Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

2. Disagregasi Inflasi

Saat ini BPS menerbitkan inflasi berdasarkan dua pengelompokan, yaitu disagregasi inflasi dan pengelompokan berdasarkan COICOP. Proses disagregasi inflasi digunakan untuk membuat parameter inflasi yang menyoroti dampak dari penyebab yang mendasarinya.

d. Penyebab Inflasi

Terjadinya inflasi seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tekanan sisi penawaran (Cost Push Inflation): Inflasi jenis ini dipicu oleh peningkatan biaya produksi atau tekanan sisi penawaran.
2. Tekanan sisi permintaan (juga dikenal sebagai inflasi tarikan permintaan): Jenis inflasi ini disebabkan oleh peningkatan permintaan barang dan jasa dibandingkan dengan pasokannya. Keadaan ini dalam pengertian makroekonomi dicirikan oleh output riil yang melebihi output potensial atau permintaan total (permintaan agregat) yang melebihi kapasitas perekonomian. Hal ini dapat merangsang kenaikan harga.
3. Ekspektasi Inflasi: Faktor yang dipengaruhi oleh ekspektasi dan persepsi masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan adalah

ekspektasi inflasi. Konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya dapat mengambil keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Ada dua kategori ekspektasi inflasi:

- Ekspektasi terhadap inflasi yang bersifat adaptif adalah ekspektasi yang diperoleh dari data historis atau pengalaman masa lalu.
- Ekspektasi inflasi di masa depan yang didasarkan pada perkiraan dan analisis terhadap variabel ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan.

e. Peran Pemerintah Mengatasi Inflasi

Dalam mengatasi inflasi ada beragam usaha keras yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, dengan berbagai kolaborator strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Meningkatkan koordinasi kebijakan merupakan langkah taktis pertama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian domestik. Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0% hingga 5,0%, khususnya pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ketiga, memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri dengan mempercepat pelaksanaan program penyimpanan pangan dan mendorong kolaborasi antardaerah yang lebih besar. Keempat, menyediakan data pangan secara lebih luas untuk membantu pengembangan langkah-langkah pengendalian inflasi. Kelima, meningkatkan sinergi komunikasi untuk membantu mengelola ekspektasi inflasi Masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa berdedikasi untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan melalui kebijakan yang terkoordinasi dan selaras dengan sasaran inflasi. Menciptakan dan memusatkan prediksi inflasi masyarakat agar berhubungan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan merupakan salah satu cara mengendalikan inflasi dan menuju inflasi yang rendah dan stabil. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 terkait Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan target inflasi. Sementara itu, pemerintah menetapkan sasaran

inflasi untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang tersebut (Triwahyuni, 2021).

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Definisi Pengangguran

Ada dua kategori orang yang tidak bekerja: (1) menganggur atau (2) tidak termasuk dalam angkatan kerja. Seseorang harus sudah mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya dan sudah siap bekerja agar dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran. Seseorang yang sudah putus asa mencari pekerjaan atau tidak mau bekerja tergolong bukan angkatan kerja. Mereka yang tidak bekerja antara lain adalah pegawai tetap, pensiunan, dan pelajar. Sedangkan tingkat pengangguran adalah rasio jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja (Case, 2007).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase besaran pengangguran terhadap besaran angkatan kerja. Pengangguran terbuka termasuk dari : (1) golongan yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja, (2) golongan yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang menyiapkan usaha, (3) golongan yang tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari kerja karena merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan, (4) golongan yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Menurut (Case, 2007), ketika mengacu pada pengangguran yang terjadi secara alami sebagai komponen operasi perekonomian, para ekonom terkadang menggunakan frasa tingkat pengangguran alamiah. Kata alamiah kurang tepat, jadi gagasan ini juga agak samar-samar. Mungkin cara terbaik untuk mengkonseptualisasikan tingkat alami adalah sebagai produk dari tingkat struktural dan tingkat friksional.

b. Teori Pengangguran

1. Teori Keynes

Menurut teori Keynes, pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan efektif dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa rendahnya permintaan agregat bertanggung jawab atas rendahnya penghasilan dan meningkatnya pengangguran yang menggambarkan karakteristik kemerosotan ekonomi (Hoppe,

2007). Dalam teorinya, Keynes menyarankan agar pemerintah memperbesar pengeluaran konsumsi sebagai langkah untuk mengatasi pengangguran akibat rendahnya permintaan efektif (M. P. Todaro, 1994).

c. Macam-macam Pengangguran

Terdapat berbagai jenis pengangguran yang terjadi diakibatkan karena belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Berikut kategori pengangguran berdasarkan penyebabnya:

Menurut (Case, 2007), mengkategorikan pengangguran berdasarkan penyebabnya ke dalam tiga tipe, yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Persentase pengangguran yang disebabkan oleh proses standar pasar tenaga kerja. Digunakan untuk menunjukkan masalah sementara dengan keterampilan atau penyesuaian pekerjaan dalam jangka pendek. Kompleksitas dalam mencocokkan keterampilan dan pekerjaan meningkat seiring dengan adanya diferensiasi pekerjaan dan jumlah keterampilan yang dibutuhkan, sehingga berpotensi menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran friksional.

2. Pengangguran Struktural

Persentase pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian sebagai akibat hilangnya pekerjaan dalam jumlah besar di industri tertentu. Masalah penyesuaian jangka panjang, masalah yang biasanya berlangsung bertahun-tahun, ditandai dengan pengangguran struktural. Pengangguran struktural merugikan pekerja meskipun hal ini merupakan komponen penting dalam perekonomian yang dinamis.

3. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis merupakan peningkatan pengangguran yang terjadi selama masa resesi dan depresi. Dapat dikatakan, lonjakan pengangguran akibat resesi hanyalah tanda alamiah dari permasalahan yang lebih dalam.

d. Peran Pemerintah Mengatasi Pengangguran

Dalam masyarakat kita, kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat satu sama lain. Sebab, kemiskinan di negeri ini mau tidak mau akan meningkat seiring dengan

meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah sebagai pihak yang paling berkuasa dalam pengambil kebijakan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemberdayaan sosial yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan lebih mendapat perhatian karena mencakup dua komponen: (1) penentuan nasib sendiri yang memberikan kebebasan kepada masyarakat miskin untuk memilih bagaimana mengatasi permasalahan mereka; dan (2) pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan masyarakat tetap menjadi pemeran utama dalam masalah tersebut (Mulyadi, 2016).

Pemerintah menerapkan strategi berikut untuk mengurangi pengangguran: 1) Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal; 2) Menjadwalkan pelatihan kerja yang sesuai dengan posisi kerja yang dibutuhkan; 3) Menciptakan industri dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi; 4) Menjamin keberhasilan pembangunan proyek-proyek publik yang dilakukan pemerintah; 5) Meningkatkan daya beli masyarakat (Firnawati et al., 2016). Pemerintah melakukan beberapa strategi untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia, salah satunya dengan mengidealkan belanja pusat dan daerah sebagai penunjang program padat karya, baik di desa maupun di kota. Selain itu, saat ini pemerintah telah memiliki beberapa program prakerja terkait pelatihan *skill* yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini, dengan tujuan agar para tenaga kerja sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Disisi lain, pemerintah juga memotivasi dan memberi dukungan serta bantuan kepada masyarakat muda untuk menjadi wirausaha atau menciptakan perusahaan rintisan bidang teknologi dengan tujuan sebagai lapangan pekerjaan baru.

2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP)

Menurut BPS (2022), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan rasio-rasio yang membentuk NTP. Ib berfungsi sebagai ukuran tingkat pendapatan produsen pertanian, sedangkan Ib menggambarkan permintaan petani dalam hal biaya produksi dan konsumsi.

Landasan penghitungan NTP adalah anggapan bahwa petani, yang bertindak sebagai pelaku ekonomi dengan menghasilkan produk pertanian dan kemudian menjual hasilnya, juga merupakan konsumen yang membeli komoditas dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya produksi dalam proses menghasilkan hasil pertanian. Dari sudut pandang konseptual, NTP merupakan dimensi ketertukaran produk pertanian yang dihasilkan petani dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan input produksi produk pertanian.

Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu jenis data statistik yang dapat digunakan sebagai indikasi untuk mengukur seberapa baik kemajuan pembangunan di sektor pertanian. Indikator pengganti yang dapat mengukur derajat kesejahteraan petani adalah NTP. Dalam menentukan arah kebijakan pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator untuk melacak perkembangan tingkat kesejahteraan petani secara bersamaan jika dihubungkan dengan statistik produktivitas pertanian.

b. Arti Angka Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara garis besar, ada tiga pengertian dari setiap angka dalam data Nilai Tukar Petani yang disajikan, antara lain :

1. $NTP > 100$, berarti peningkatan harga produk pertanian yang dihasilkan petani lebih besar dibandingkan kenaikan harga komoditas barang dan jasa yang mereka gunakan. Hasilnya, kesejahteraan petani saat ini lebih tinggi dibandingkan pada masa tahun dasar.
2. $NTP = 100$, berarti kenaikan harga komoditas dan jasa yang dibeli petani sejalan dengan kenaikan harga produk pertanian yang dihasilkan petani. Hasilnya, tidak ada perubahan tingkat kesejahteraan petani dibandingkan periode tahun dasar.
3. $NTP < 100$, berarti penurunan harga barang dan jasa yang digunakan petani relatif terhadap pertumbuhan harga produk pertanian yang dihasilkan petani. Akibatnya, dibandingkan periode tahun dasar, tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan.

c. Kegunaan Nilai Tukar Petani (NTP)

Dengan diperhitungkannya Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Perubahan harga barang yang diproduksi oleh petani dapat kita karakterisasi berdasarkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Di sektor pertanian, indikator ini digunakan bersama dengan data pendukung untuk menghitung PDB dan PDRB, atau Pendapatan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto.
2. Dalam kumpulan indeks harga yang dibayar petani, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) menampilkan perubahan harga produk dan jasa yang dikonsumsi oleh petani, yang merupakan mayoritas konsumsi penduduk di pedesaan, merupakan indikator untuk inflasi pedesaan. Indeks Biaya Produksi dan Barang Modal Tambahan menampilkan perubahan harga barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi komoditas pertanian.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan apakah kenaikan biaya kebutuhan petani dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani dari outputnya. Dengan kata lain, NTP menggambarkan bagaimana produk pertanian dapat ditukar dengan barang dan jasa lain serta biaya produksi.

d. Ruang Lingkup

Sektor pertanian yang masuk dalam perhitungan Nilai Tukar Petani mencakup subsektor Tanaman Pangan, subsektor Tanaman Holtikultura, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, subsektor Perternakan dan Subsektor Perikanan. Angka NTP yang disajikan merupakan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh BPS RI dan disediakan sebagai salah satu Berita Resmi Statistik yang akan diunggah setiap awal bulan oleh BPS.

e. Peran Pemerintah Terhadap Nilai Tukar Petani

Indikator positif penerapan kebijakan pangan dan pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan di tingkat konsumen. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan alat utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga pemulihan

ekonomi tetap berjalan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk mengatasi krisis pangan dan pertanian yang berdampak pada Nilai Tukar Petani (NTP). 1) dengan menambahkan lebih banyak nutrisi pangan. 2) menyediakan lebih banyak pangan dengan harga yang berkelanjutan dan dapat diprediksi. 3) meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan hasil pertanian dan memfasilitasi akses pasar merupakan pendukung dua strategi sebelumnya. 4) memperluas pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian. 5) Memperbaiki sistem pangan (Bappenas, 2020). Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) berperan dalam upaya pemerintah menjaga indeks NTP dari waktu ke waktu. Program yang dilakukan NFA untuk menjaga nilai NTP tetap tinggi yaitu dengan mengestimasi kebijakan fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu, NFA juga menerapkan fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP).

2.1.6 Upah Minimum Provinsi (UMP)

a. Pengertian Upah Minimum

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa upah minimum adalah batas upah terendah (termasuk tunjangan tetapi tidak termasuk upah lembur) yang diberikan kepada pekerja sesuai jenis jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimal yang ditetapkan bagi seluruh wilayah kabupaten/kota di satu provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999, menyatakan bahwa upah minimum adalah gaji bulanan terendah yang termasuk dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Regional Tingkat 1 untuk selanjutnya disebut UMR Tk.1 adalah upah minimum yang resmi di satu provinsi.

b. Teori Upah

Teori upah efisiensi menerangkan bahwa tingkat upah berkorelasi dengan peningkatan produktivitas pekerja. Jika hal ini terjadi, dunia usaha mungkin akan termotivasi untuk membayar upah lebih tinggi dari yang dapat ditanggung pasar (Case, 2007).

1. Teori Upah Alami

Teori upah alami (natural wage) dicetuskan oleh David Ricardo. Menurut teori ini, upah dibagi menjadi dua jenis, yaitu upah alami dan upah pasar. Upah alami bertumpu pada kapasitas *demand* dan *supply* tenaga kerja di pasar. Upah alami ialah upah yang dipakai sebagai referensi agar karyawan hidup mencukupi, sementara upah pasar adalah upah yang selayaknya diterima pekerja. Apabila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kesejahteraan pekerja akan meningkat. Sebaliknya, jika upah pasar lebih kecil dibandingkan upah alami, pekerja termasuk dalam golongan non-sejahtera.

c. Kebijakan Upah Minimum

Aturan terkait upah minimum terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 yang membahas perihal ketenagakerjaan yang mencakup :

1. Pemerintah memutuskan peraturan pengupahan yang untuk memelihara pekerja dan buruh agar dapat mencapai pendapatan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Tuntutan penghidupan yang layak, serta inventivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan upah minimum.
2. Ada dua jenis upah minimum: a. upah minimum yang ditetapkan oleh provinsi, kabupaten, atau kota; dan b. upah minimum yang ditentukan oleh sektor-sektor dalam provinsi, kabupaten, atau kota.

Gubernur menetapkan upah minimum dengan mengamati ajuan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

d. Peran Pemerintah Mengatur Upah Minimum

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan produktivitas dan pertumbuhan perekonomian nasional, serta untuk mencapai kelangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka telah ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Upah Minimum. Penetapan Upah Minimum dalam Kelangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja mengarahkan agar dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing secara terkoordinasi dan terpadu.

Dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, pekerja kini bisa mendapat jaminan kenaikan upah minimum dengan menerapkan Formula Upah Minimum yang mempertimbangkan tiga faktor: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tertentu. Dewan Pengupahan Daerah menentukan indeks spesifik yang dimaksud dengan mempertimbangkan rata-rata atau median gaji dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Selain itu, unsur-unsur terkait tambahan yang terkait dengan kondisi ketenagakerjaan juga diperhitungkan.

Tugas Gubernur selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khusus yang berkaitan dengan keuangan, Gubernur menentukan upah minimum setiap provinsi dengan mencermati anjuran dewan pengupahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tugas dewan pengupahan provinsi antara lain menyampaikan rekomendasi dan gagasan kepada gubernur untuk penetapan upah minimum kabupaten dan kota serta provinsi. Badan ini juga mengawasi penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi, khususnya dengan menyediakan sumber daya untuk merumuskan perubahan pada sistem pengupahan nasional. Setelah adanya kesepakatan antara gubernur dan dewan pengupahan, maka ditetapkanlah Upah Minimum Provinsi (UMP) (Siagian, 2023).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

Menurut (Case, 2007), kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi. Kenaikan harga rata-rata berbagai barang selama periode waktu tertentu digunakan untuk menghitung inflasi. Bergantung pada apakah pendapatan seseorang meningkat lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan harga pokok barang yang dibelinya, inflasi dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Mereka yang berpendapatan tetap adalah kelompok yang paling sering disebutkan ketika membahas dampak inflasi. Kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa menurun secara proporsional jika pendapatan tetap dan harga naik.

Faktanya, di Indonesia kelompok pangan masih memiliki peran besar terhadap tingkat inflasi. Sedangkan sebanyak 75 persen masyarakat miskin menggunakan

sebagian uangnya untuk makanan. Oleh karena itu, jika kenaikan harga terus terjadi dan tidak diimbangi dengan kenaikan upah, maka akan menurunkan pengeluaran masyarakat lalu terjadi penurunan kesejahteraan dan efeknya akan semakin banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Penelitian (M. A. dan M. R. Sari, 2022) menghasilkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini memiliki arti jika inflasi naik maka akan menaikkan tingkat kemiskinan juga. Hal ini sejalan dengan teori Nurke yang mengemukakan bahwa ketika pendapatan seseorang rendah, maka kesanggupan masyarakat untuk menabung juga rendah. Berdasarkan teori, inflasi yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam penelitian (Murjani, 2019) menghasilkan bahwa, pada jangka pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Kemiskinan

Trickle-down economics berisi makna bahwa pertambahan dengan sendirinya akan mengakhiri kemiskinan, dengan asumsi eskalasi juga akan menciptakan surplus tenaga kerja. (Arestis et al., 2007, 259) dalam (Puspitarini, 2018). Teori trickle-down economics menguraikan bahwa perkembangan sekelompok orang secara alami akan mengalir ke bawah, menghasilkan lapangan kerja dan peluang ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menghasilkan berbagai kondisi untuk produksi dan ekonomi yang adil. Menurut hipotesis ini, pasti akan ada tren vertikal di mana dari orang kaya akan ke penduduk miskin seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya adalah eskalasi tidak senantiasa diiringi oleh terbentuknya lapangan kerja. Karena itu, Trickle-down economics tidak mampu berlangsung seandainya pertumbuhan berjalan sendiri sementara tidak diiringi dengan penciptaan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis data dari Penelitian (Putri, 2021) memiliki hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kesimpulan penelitian ini berarti tingkat pengangguran belum tentu memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan Kemiskinan

Menurut (M. P. and S. C. S. Todaro, 2011), menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja terutama di bidang pertanian dan bidang terkait. Generalisasi ini didukung oleh data cross-sectional yang luas dari negara-negara berkembang. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga masyarakat termiskin di dunia berupaya mencari nafkah sebagai buruh di bidang pertanian atau petani skala kecil.

Sebagian besar dari 15 provinsi termiskin yang akan diteliti merupakan daerah yang mengandalkan sektor pertanian, yaitu provinsi Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Nilai Tukar Petani sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian pada provinsi-provinsi tersebut. Oleh karena itu, nilai tukar petani menjadi indikator yang sangat berpengaruh untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang bekerja sebagai petani di provinsi-provinsi tersebut.

Penelitian (Rahmawati, 2020) menunjukkan hasil dari pengolahan regresi data panel dengan hasil persentase kemiskinan di pedesaan dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi variabel NTP dan Gini Ratio. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NTP dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan petani, namun keberhasilannya akan berkurang jika pemerataan pendapatan tidak diterapkan.

2.2.4 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kemiskinan

Dalam (M. P. and S. C. S. Todaro, 2011) dijelaskan Kurva Lorenz dan penggunaan tiga kasus khusus, Field menunjukkan keabsahan

1. Dalam tipologi pengayaan sektor tradisional, pertumbuhan akan mengarah pada berkurangnya kemiskinan jika terjadinya distribusi pendapatan yang lebih adil, dan pendapatan yang lebih tinggi secara keseluruhan.
2. Dalam tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, Pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, distribusi pendapatan yang kurang merata, dan tingkat kemiskinan yang tetap sama.

3. Akhirnya, dalam kasus pertumbuhan tipe Lewis dengan memperluas sektor modern, Kurva Lorenz akan selalu berpotongan, hal ini menunjukkan bahwa kurva tersebut tidak mampu memberikan pernyataan yang jelas mengenai perubahan ketimpangan relatif. Pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun.

Pendapatan per kapita yang rendah dan ketidakseimbangan penyebaran pendapatan yang signifikan berkontribusi akan besarnya kemiskinan. Jelas terlihat bahwa tingkat kemiskinan absolut menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita pada setiap distribusi pendapatan (M. P. and S. C. S. Todaro, 2011). Penelitian (Priseptian, 2022) yang dilakukan di daerah Jawa Timur dengan hasil, bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini memiliki arti, jika UMP tinggi maka semakin rendah atau terjadi penurunan kemiskinan. Namun sebaliknya, jika UMP rendah maka tingkat kemiskinan tinggi atau meningkat.

2.3 Tinjauan Empiris

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Desrini Ningsih, Puti Adiny (2018)	Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Dengan menggunakan data <i>time series</i> dengan teknik analisis regresi linier berganda	Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2	Desri Yesi, Yenny Sugiarti (2021)	Pengaruh Nilai Tukar Petani, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Garis Kemiskinan di Sumatera Selatan	Statistik analitik dengan analisis regresi. Teknik analisisnya menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Nilai Tukar Petani, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan dengan level sedang,

				sedangkan yang paling berpengaruh dari ketiga indikator tersebut adalah Nilai Tukar Petani.
3	Lega Priseptian, Wiwin Priana Primandhana (2022)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan	Analisis regresi linier berganda dengan model <i>ordinary least squares</i> (OLS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. artinya, Variabel IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan.
4	Erliza Milenia Putri, Dewi Zaini Putri (2021)	Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
5	Ahmad Murjani (2019)	Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia : ARDL Approach	Model ARDL	Pada jangka panjang, variabel inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam jangka pendek, hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang

				mempengaruhi kemiskinan secara signifikan.
6	Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, Nana Triapnita Nainggolan (2020)	Factors Affecting Poverty in North Sumatra	Data cross-section	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.
7	Nadia Islami, Ali Anis (2019)	Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Ordinary Least Square (OLS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
8	Yulia Adelia Sari (2021)	Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Time Series dengan model Ordinary Least Square (OLS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan

variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pemicu kemiskinan menurut Kartasasmita (1993:2-3) dalam (Solihin, 2014) dikategorikan dengan tiga pengertian, yaitu : 1) Kemiskinan Natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami atau kemiskinan yang dialami karena berasal dari kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 2) Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan (baik absolut maupun relatif) yang diakibatkan oleh kesenjangan struktur masyarakat yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan. 3) Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang menggambarkan pola pikir seseorang atau masyarakat sebagai akibat dari cara hidupnya, kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkannya dan rasa kekurangannya.

Inflasi merupakan salah satu fenomena kontemporer yang paling signifikan dan terjadi hampir di setiap negara di dunia. Kecenderungan harga untuk tumbuh secara umum dan terus-menerus merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan inflasi (Mankiw, 2006). Inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui beberapa cara. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat karena masyarakat dengan berpenghasilan rendah akan sulit menyesuaikan diri dengan kenaikan harga tersebut. Lalu inflasi juga akan merugikan tabungan dan pendapatan tetap, dan inflasi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi dan menciptakan ketidakstabilan pekerjaan.

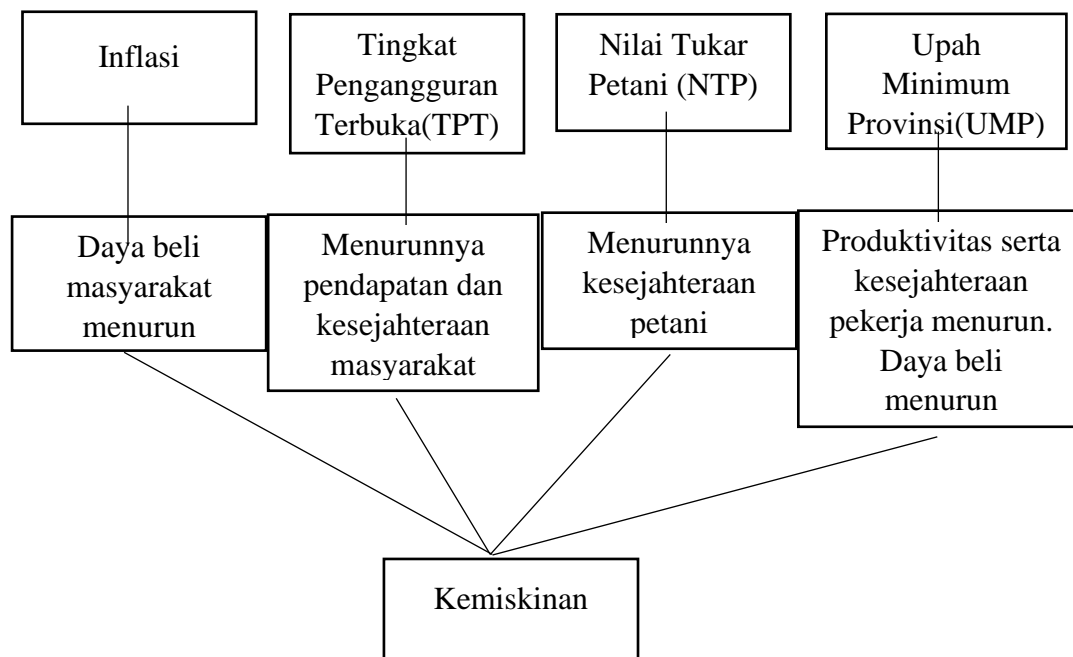
(Menurut (Sukirno, 2010), Ketika seseorang bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, mereka disebut pengangguran. Pengangguran tidak berlaku bagi seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan. Penyebab utama pengangguran adalah pengeluaran keseluruhan yang tidak mencukupi). Pengangguran dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Ketika banyaknya individu yang menganggur, maka akan mengalami kesulitan ekonomi karena kurangnya sumber

pendapatan dan efeknya akan membuat kondisi seseorang terlalu bergantung pada dukungan sosial, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga serta menurunnya keterampilan dan produktivitas.

Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu jenis data statistik yang dapat digunakan sebagai indikasi untuk mengukur seberapa baik kemajuan pembangunan di sektor pertanian. Indikator pengganti yang dapat menakar derajat kesejahteraan petani adalah NTP. Nilai tukar petani sendiri memiliki pengaruh terhadap kemiskinan karena berdampak pada kesejahteraan komunitas petani. Kondisi nilai tukar yang baik dapat berdampak positif pada kesejahteraan komunitas pertanian secara keseluruhan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah agraris.

Menurut (Heckman, 1974), untuk mengoptimalkan keuntungan bisnis, pengusaha akan memanfaatkan aspek-aspek produksi sedemikian rupa sehingga akan memberi imbalan atau menerima nilai tambah atas keuntungan marjinal dari faktor-faktor produksi tersebut. Akibatnya, ketika pengusaha mempekerjakan orang, nilai tambah dari output marjinal mereka sama dengan upah yang bersedia diterima oleh para pekerja tersebut, dalam hal ini adalah upah minimum yang diterima oleh pekerja. Upah minimum akan berpengaruh akan kualitas hidup seseorang dan berpengaruh pada tingkat kemiskinan apabila tingkat upah minimum rendah. Upah minimum juga berpengaruh terhadap daya beli, kesenjangan pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, upah minimum harus diatur seadil mungkin dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah diterangkan mengenai hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) kemudian dikembangkan menjadi kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



2.5 Hipotesis

Berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu, teori dan permasalahan sebelumnya, hipotesis ini bertujuan untuk menyampaikan Gambaran dari arah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka bentuk hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

H_{a1} : Diduga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

H_{a2} : Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka positif signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

H_{a3} : Diduga Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

H_{a4} : Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

H_{a5} : Diduga Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani dan Upah Minimum Provinsi secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia menggunakan indikator persentase penduduk miskin dengan nilai persentase kemiskinannya lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional. 15 provinsi tersebut yaitu provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel terikat (Y) yaitu kemiskinan dan variabel bebas (X) inflasi, TPT, NTP dan UMP pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

3.2 Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Paramita, 2021) penelitian kuantitatif mengarah pada pandangan filsafat positivisme. Filsafat ini melihat suatu masalah dalam penelitian dapat dikelompokkan, cenderung bernilai tetap, nyata dan benar-benar ada, teramati, dapat diukur, dan memiliki hubungan sebab akibat.

Tabel 6. Jenis dan Data Penelitian

Nama Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan	KM	Persen	BPS
Inflasi	I	Persen	Bank Indonesia dan BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	BPS
Nilai Tukar Petani	NTP	Persen	BPS
Upah Minimum Provinsi	UMP	Juta Rupiah	BPS dan Kemnaker

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel, yakni kombinasi antara data silang (cross section) dan data runtun waktu (time series). Adapun data cross section pada riset ini adalah 15 provinsi yang menjadi provinsi termiskin di Indonesia dengan rata-rata nilai kemiskinan tinggi hingga nilai kemiskinan sedang. Provinsi-provinsi tersebut, yaitu provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan data time seriesnya adalah tahun yang diteliti, yaitu tahun 2010-2022.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Karena suatu variabel menjadi lebih jelas akibat definisi yang diberikannya, maka definisi operasional adalah definisi penjelas (Syahrudin dan Salim, 2012). Definisi operasional pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Variabel terikat yang digunakan adalah kemiskinan. Kemiskinan dalam menurut Suparlan (1984) dalam (Annur, 2013) kemiskinan adalah kehidupan tingkat rendah yang mengacu pada tingkat kekurangan materi yang dialami oleh seorang individu atau sekelompok individu dalam kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kualitas hidup yang buruk berdampak langsung terhadap tingkat moralitas, harga diri dan masalah kesehatan masyarakat yang dianggap miskin.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin pada 15 provinsi termiskin di Indonesia dengan data menggunakan satuan persen.

- b. Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikatnya baik secara positif ataupun negatif (Paramita, 2021). Definisi operasional dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan selama jangka waktu tertentu dikenal sebagai inflasi. Tidaklah tepat untuk menyebut kenaikan harga satu atau dua komoditas sebagai

inflasi kecuali jika kenaikan tersebut signifikan dan juga meningkatkan harga barang-barang lainnya (Bank Indonesia, n.d.). Adapun rumus perhitungan inflasi adalah sebagai berikut.

Laju Inflasi (LI) = $(\text{IHK bulan ini} - \text{IHK bulan sebelumnya}) / (\text{IHK bulan sebelumnya} \times 100)$

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, TPT adalah rasio besaran pengangguran akan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka termasuk oleh : (1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja, (2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang menyiapkan usaha, (3) tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari kerja karena merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan, (4) sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Rumus menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah, $\text{TPT} = \text{Jumlah pengangguran} \times 100\% / \text{Jumlah Angkatan Kerja}$

3. Nilai Tukar Petani

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022b), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan rasio-rasio yang membentuk NTP. Ib berfungsi sebagai ukuran tingkat pendapatan produsen pertanian, sedangkan Ib menggambarkan permintaan petani dalam hal biaya produksi dan konsumsi. Dari sudut pandang konseptual, NTP merupakan standar ketertukaran *output* pertanian yang dihasilkan petani dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan input produksi produk pertanian. Rumus menghitung NTP adalah, $\text{NTP} = \text{IT/IB} \times 100\%$

4. Upah Minimum Provinsi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa upah minimum adalah batas upah terendah (termasuk tunjangan tetapi tidak termasuk upah lembur) yang diberikan kepada pekerja sesuai jenis jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah gaji minimum yang ditetapkan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di satu provinsi.

3.4 Metode Analisis

Riset ini mengaplikasikan jenis data panel yang merupakan campuran dari data antar tempat atau ruang (*Cross Section Data*) dengan data rangkai waktu (*Time Series*). Data panel memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 1) Data longitudinal ialah gabungan antara *time series* dan *cross section* dapat menyajikan data yang lebih luas kemudian membentuk *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, dengan menyatukan penjelasan antara data *cross section* dan *time series* ini dapat menghilangkan masalah yang muncul selagi ada penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

3.5 Metode Estimasi

Adapun model regresi data panel terkait inflasi, TPT, NTP, UMP terhadap kemiskinan di provinsi termiskin di Indonesia ditransformasikan menjadi :

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 I_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 NTP_{it} + \beta_4 UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

KM	: Kemiskinan
I	: Inflasi
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
NTP	: Nilai Tukar Petani
UMP	: Upah Minimum Provinsi
β_0	: Konstanta Regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
ε	: <i>Error Term</i>
i	: Provinsi
t	: Tahun

3.6 Prosedur Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam memahami karakteristik lebih luas dari setiap variabel yang diaplikasikan dalam penelitian, maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Dalam tabel statistik deskriptif, ditampilkan temuan pengukuran rata-rata, minimum, dan maksimum bagi seluruh variabel yang diperlukan dalam penelitian sebagai hasil.

b. Estimasi Regresi Data Panel

Umumnya, terdapat sejumlah metode yang sering dipakai untuk mengestimasi model regresi data panel (Widarjono, 2018). Terdapat tiga pendekatan yang berbeda yaitu:

1. Metode Common Effect Model (CEM)

Menggabungkan data *cross-section* dan *time series* adalah metode yang paling mudah untuk memprediksi data panel. Dapat memproyeksikan model data panel memerlukan metode OLS hanya dengan menghubungkan data tanpa mengkaji variasi antar waktu dan individu. *Common Effect* adalah istilah untuk teknik ini.

2. Metode Fixed Effect Model (FEM)

Saat memperkirakan data panel, teknik *fixed effect model* memakai variabel dummy untuk menangkap variasi intersep antar korporasi, tetapi intersepnya tetap konstan sepanjang waktu (*time invariant*). Selain itu, model ini memperkirakan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap konstan di seluruh korporasi dan sepanjang waktu.

3. Metode Random Effect Model (REM)

Untuk mensimulasikan ketidaktahuan terhadap model sebenarnya, variabel dummy dimasukkan dalam model *fixed effect*. Namun hal ini juga berdampak pada penurunan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada gilirannya menurunkan efisiensi parameter. Metode *Random Effect Model* yang menggunakan variabel gangguan (*error terms*) untuk menyelesaikan masalah pada masing-masing perusahaan. Perlu memperkirakan data panel dalam model ini, di mana variabel-variabel gangguan mungkin terkait satu sama lain dari waktu ke waktu dan antar individu.

c. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga uji yang dipakai guna menetapkan teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel (Widarjono, 2018). Pertama, menggunakan uji statistik F dalam menentukan antara metode Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Kedua, menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) dalam menentukan antara metode Common Effect Model atau Random Effect Model. Ketiga, menggunakan uji Hausman dalam menentukan antara metode Fixed Effect Model atau Random Effect Model.

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan teknik terbaik antara metode Common Effect Model atau Fixed Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Common Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Jikalau hasil F-hitung $>$ F-tabel maka H_0 ditolak artinya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Fixed Effect Model dan sebaliknya. Selain melihat F-hitung, dapat juga melihat dari nilai P-value. Apabila P-value $>$ dari taraf nyata (α) maka H_0 ditolak artinya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Common Effect Model dan sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dijalankan untuk membuktikan teknik terbaik antara metode Fixed Effect Model atau Random Effect Model melalui dugaan sebagai berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Ketika nilai chi-squares hitung $>$ nilai chi-squares tabel maka H_0 ditolak maknanya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Fixed Effect Model dan sebaliknya. Selain melihat nilai chi-squares, dapat juga melihat dari nilai P-value. Apabila P-value $>$ dari taraf nyata (α) maka H_0 ditolak artinya teknik terbaik

dalam mengestimasi regresi data panel adalah Random Effect Model dan sebaliknya.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk menentukan teknik terbaik antara metode Common Effect Model atau Random Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Random Effect Model*

Ketika P-value < dari taraf nyata (α) maka H_0 ditolak artinya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Random Effect Model dan sebaliknya. Selain melihat P-value, dapat juga melihat dari nilai LM statistik < nilai kritis statistik chi-squares maka H_a ditolak artinya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Common Effect Model dan sebaliknya.

d. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan sebuah kualifikasi yang mesti dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda berdasar metode Ordinary Least Square. Estimator yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) memiliki beberapa persyaratan antara lain estimator linear, tidak bias, dan memiliki varian minimum (Widarjono, 2018). Termuat beberapa uji yang diaplikasikan guna menentukan apakah uji asumsi klasik sudah memenuhi syarat agar estimator OLS yang tersedia menjadi yang terbaik, sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Dalam menguji signifikansi antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji t hanya akan valid apabila residual terdistribusi normal. Terdapat dua metode dalam mendeteksi residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu:

- Histogram Residual

Histogram residual merupakan sebuah metode grafis paling mudah digunakan untuk mendeteksi bentuk Probability Distribution Function (PDF) dari variabel random terdistribusi normal atau tidak. Bentuk grafik terdistribusi normal akan

membentuk lonceng seperti distribusi t sebelumnya. Apabila histogram residual semacam grafik terdistribusi normal maka dapat disebutkan bahwa residual terdistribusi normal.

- Uji Jarque-Bera

Dasar dari metode Jarque-Bera ialah pada sampel besar yang diperkirakan bersifat asymptotic dengan perhitungan skewness dan kurtosis. Adapun hipotesis metode ini sebagai berikut:

Ho : Terdistribusi normal

Ha : Tidak terdistribusi normal Apabila hasilnya memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ maka Ha ditolak artinya data terdistribusi normal dan sebaliknya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hanya dua dari tiga asumsi terakhir mengenai variabel gangguan yang membawa konsekuensi signifikan bagi penduga metode OLS jika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Variabel gangguan hanya mempengaruhi intersep dan tidak berpengaruh terhadap *slope* jika rata-ratanya tidak nol. Model OLS untuk regresi sederhana dan regresi berganda membuat asumsi penting bahwa varian variabel adalah homoskedastisitas. Namun kenyataannya, varian variabel gangguan (*error terms*) sering kali tidak konstan dan disebut heteroskedastisitas. Ketika mempelajari data *cross section*, seperti penjualan bisnis dalam suatu industri, muncul heteroskedastisitas. Besar kecilnya perusahaan akan mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel gangguan (Widarjono, 2018).

Dengan adanya heteroskedastisitas pada model regresi mengakibatkan estimator OLS tidak menghasilkan BLUE namun hanya LUE dan memiliki konsekuensi:

- 1) Perhitungan standard error metode OLS tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya apabila varian tidak minimum,
- 2) Dampak nomer 1 maka interval estimasi maupun uji hipotesis berdasar distribusi t atau F tidak lagi dapat dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Cara untuk menemukan masalah heteroskedastisitas dalam suatu model regresi pada penelitian ini menggunakan Metode White. Dugaan dari pengujian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a : Terdapat heteroskedastisitas

Adapun kriteria Uji Heteroskedastisitas dengan Metode White sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} < 0.05$, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} > 0.05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Deteksi Multikolinearitas

Ikatan linear antara variabel bebas dalam satu regresi disebut dengan multikolinearitas. Ada dua bentuk hubungan linear yang terjadi antara variabel bebas yaitu bentuk hubungan linear yang sempurna (perfect) dan hubungan linear yang kurang sempurna (imperfect). Konsekuensi adanya multikolinearitas dalam model regresi apabila memakai metode OLS namun tetap mempertahankan asumsi lain adalah:

- 1) Estimator tetap BLUE namun memiliki varian dan kovarian yang besar akibatnya sukar memperoleh estimasi yang tepat,
- 2) Dampak nomer 1 maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji t kecil hingga membuat variabel bebas secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel bebas,
- 3) Meski secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas namun nilai koefisien determinasi R^2 relatif tinggi.

Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas pada penelitian ini dengan korelasi parsial antar Variabel Independen.

Hipotesis dari pengujian ini adalah :

H_0 : Tidak ada masalah multikolinearitas

H_a : Ada masalah multikolinearitas

Kriteria dari pengujian ini adalah:

- 1) Nilai korelasi > 0.85 , maka ada masalah multikolinearitas
- 2) Nilai korelasi < 0.85 , maka tidak ada masalah multikolinearitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang bermaksud untuk melihat tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu penelitian dengan penelitian lainnya. Menurut literal, autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antara anggota observasinya satu dengan observasinya lain yang berlainan waktu. Autokorelasi melihat hubungan antara tidak adanya satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya dalam kaitannya dengan metode OLS. Sementara, salah satu dugaan metode OLS yang bersangkutan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya kaitan antara satu variabel gangguan dengan dengan variabel gangguan lainnya. Terdapat beberapa cara untuk menyelidiki masalah autokorelasi dalam suatu model regresi, yaitu dengan menggunakan Metode Durbin-Watson (DW).

Adapun ketentuan dari metode ini sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U < d < 4 - d_U$	Menerima H_0 ; tidak ada autokorelasi positif/negatif
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi negatif

Sumber: Agus Widarjono, 2013

e. Pengujian Hipotesis

Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan saat menguji hipotesis antara lain:

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Uji t ialah pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Adapun hipotesis uji ini sebagai berikut:

i. Inflasi terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

ii. Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_2 = 0$ (Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

$H_a : \beta_2 > 0$ (Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

iii. Nilai Tukar Petani terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_3 = 0$ (Nilai Tukar Petani tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

$H_a : \beta_3 < 0$ (Nilai Tukar Petani berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

iiii. Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_3 = 0$ (Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

$H_a : \beta_3 < 0$ (Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan)

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) dengan derajat kebebasan ($df=n-K$). Maka, apabila nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya. Selain itu, dapat juga melihat dari nilai P-value. Apabila P-value $<$ dari taraf nyata (α) maka H_a ditolak dan sebaliknya.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji F merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Adapun hipotesis uji ini sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Secara bersama-sama seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (Secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat) Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) dengan derajat kebebasan ($df=n-K$). Maka, apabila nilai F-hitung $<$ nilai F-tabel maka H_0 diterima dan sebaliknya.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Diuraikan oleh (Widarjono, 2018), koefisien determinasi merupakan proporsi dari total variasi variabel terikat Y yang dijabarkan oleh garis regresi (variabel bebas, X). Sekiranya nilai koefisien determinasi mendekati satu maka garis regresi semakin baik karena mampu menjelaskan data aktual. Sementara, apabila nilai koefisien determinasi mengarah nol, maka garis regresi kurang baik. Terdapat alasan mengapa koefisien determinasi yang rendah antara yaitu mungkin variabel bebas (X) bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel terikat (Y).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini meneliti sejauh mana pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, dan Upah Minimum Provinsi dapat berpengaruh pada kemiskinan yang terjadi di 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010 sampai 2022. Dari pengujian dan analisis yang telah dilakukan, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia, bila inflasi turun maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia, dimana bila Tingkat Pengangguran Terbuka naik, maka kemiskinan juga meningkat.
3. Nilai Tukar Petani berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia, dimana bila Nilai Tukar Petani naik, maka kemiskinan akan menurun.
4. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia, dimana bila Upah Minimum Provinsi naik, maka kemiskinan akan menurun.
5. Uji koefisien simultan menunjukkan hasil bahwa variabel bebas, yaitu Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, dan Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada 15 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2022.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil temuan dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini, saran yang dapat disumbangkan oleh penulis terkait kemiskinan yang ada di Indonesia adalah:

1. Sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah masing-masing provinsi turut memfasilitasi dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, hal tersebut sebagai alternatif apabila terjadi inflasi, masyarakat tetap mampu bertransaksi barang dan jasa.
2. Sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah masing-masing provinsi diharapkan mampu memperluas lapangan pekerjaan dan membuat kebijakan terkait tenaga kerja sehingga mengurangi masalah adanya pengangguran tersembunyi. Selain itu, pemerintah bisa terus menyediakan program pelatihan kerja yang selaras dengan keterampilan yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja dan perlunya perluasan informasi terkait lowongan pekerjaan yang tersedia.
3. Sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwa Nilai Tukar Petani memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah masing-masing provinsi diharapkan mampu memperluas fasilitas petani-petani di daerahnya, seperti subsidi pupuk, dan terkait kebijakan harga jual hasil pertanian. Selain itu, perlunya modernisasi dan akses yang mudah terhadap modal dan teknologi mampu membantu para petani untuk meningkatkan produktifitas petani dan kesejahteraan petani.
4. Sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah masing-masing provinsi agar membuat kebijakan terkait upah minimum para pekerja karena upah terkait dengan masalah kesejahteraan para pekerja. Selain itu, upah minimum dapat

memperkecil disparitas antara upah terendah dan upah tertinggi di perusahaan.

5. Pemerintah daerah pada 15 provinsi pada penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung di masing-masing daerahnya. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mampu mengurangi masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service, 1*.
- Aditiya, I. M. (2023). *Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara 2023*. GoodStats. <https://goodstats.id/infographic/tingkat-kemiskinan-di-asia-tenggara-2023-HBHy1>
- Ali, A. et al. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi. *Aksara Kawanua: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*.
- Ambya, U. C. (2022). Hubungan antara belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika, 17(1)*.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal, 2*.
- Ardian, R. Y. dan A. B. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual (JEA), 1*.
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua*.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Nilai Tukar Petani 2022*.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Inflasi*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>
- BAPPEDA Provinsi Papua. (2020). *Laporan Infografis Hasil Pembangunan Provinsi Papua*.
- BAPPENAS. (2020). *Bappenas Paparkan Strategi Atasi Krisis Pangan dan Pertanian Akibat Covid-19*. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-paparkan-strategi-atasi-krisis-pangan-dan-pertanian-akibat-covid-19>
- BPS Provinsi Papua Barat. (2022). *Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat 2022*.
- Case, K. E. and R. C. F. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*.

- Chairunnisa, N. M. dan Y. N. Q. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *PETA*, 7.
- Emalia, Z. (2018). Telaah Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Propinsi Lampung :Sebuah Eksplorasi dengan Data Input-Output. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1).
- Emalia, Z. dan I. B. (2022). Spatial Phenomenon of Multidimensional Poverty in Sumatera Island. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5.
- Faisal, M. dan I. (2020). The Analysis of Economic Growth, Unemployment Rate and Inflation on Poverty Levels in Indonesia (Using the Vector Error Correction Model (VECM) Method). *Journal Of Maliksussaleh Public Economics*, 3.
- Firrawati et al. (2016). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Hanifah, S. dan N. H. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent Journal of Economics*, 1.
- Haughton, J. dan S. R. K. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*.
- Hoppe, H.-H. (2007). *Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian*.
- Intan, A. dan A. M. (2023). Determinan Kemiskinan Multidimensional 34 Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Journal on Education*, 6(1).
- Islami, N. dan A. A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.
- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah Kuatkan Ketahanan Pangan Sekaligus Tingkatkan Kesejahteraan Petani*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3017/pemerintah-kuatkan-ketahanan-pangan-sekaligus-tingkatkan-kesejahteraan-petani>
- Lewis, W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*.
- Mankiw, N. G. (2006). *Teori Ekonomi Makro*.
- Maulidina, S. et al. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian di Indonesia Bagian Barat. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology*, 2.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Journal Kajian DPR*, 21.
- Murjani, A. (2019). Short-Run and Long-Run Impact of Inflation, Unemployment,

- and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia : ARDL Approach. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.
- Murobbi, M. N. dan H. U. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4.
- Murwiati, A. dan R. Z. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Keluarga Penerima Manfaat, dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Regresi Kuantil. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Nasrun, M. A. et al. (2020). The Role of Agricultural Sector in Explaining Poverty in Indonesia: A Study Case of West Kalimantan. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10.
- Ningsih, D. dan A. P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Samudra Ekonomika*, 2.
- Paramita, R. W. D. et al. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Pratama, A. dan A. R. (2023). The Influence of Wages, Human Development Index, And Gross Regional Domestic Product on Poverty in Provinces in Indonesia. *Sinomics Journal*, 2(5).
- Priseptian, L. dan W. P. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24.
- Puspitarini, R. C. dan I. A. (2018). Trickle-Down Economics Arthur Lewis dan Ekonomi Pembangunan Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018. *Journal of International*, 1.
- Putri, E. M. dan D. Z. P. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10.
- Rahmawati, N. (2020). Pengaruh Kesejahteraan Petani Terhadap Kemiskinan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 20.
- Ratih, A. et. a. (2023). Is Multidimensional Povert Different from Monetary Poverty in Lampung Province. *ICEBE*.
- Ridwan, M. F. (2021). *Buku Ekonomi Publik*.
- Ristika, E. D. et al. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Sandi, F. et al. (2023). Pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Sari, M. A. dan M. R. (2022). Analysis of Inflation, Population, and Economic Growth on Poverty in Muslim- Majority Provinces in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 4.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan

- Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10.
- Senewe, Julita et al. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 9.
- Siagian, S. L. Y. et al. (2023). Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Menentukan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 11.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management (SME's)*, 13.
- Solihin, D. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*.
- Sukidjo. (2009). Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri. *Cakrawala Pendidikan*.
- Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi. Teori Pengantar*.
- Susanto, R. dan I. P. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7.
- Syahrudin dan Salim. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Todaro, M. P. (1994). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*.
- Todaro, M. P. and S. C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*.
- Triono, T. A. dan R. C. S. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1.
- Triwahyuni. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.
- wulandari, sari et al. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.
- Yesi, D. dan Y. S. (2021). Pengaruh Nilai Tukar Petani, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Garis Kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5.